

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Unnes Press. Semarang.
- Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. 2012. *Research Desain (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- George R. Terry. *Principles of Management*, INC. Homewood, Irwin, Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977 h 410.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995 h. 294.
- Jogiyanto, H.M., Abdilah, W. 2011. *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, K. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Ambarwati, N. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan yang Efektif dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Sumber Mas Indah Plywood. *Jurnal Akunesa*, 3(3), 76-89.
- Candrasari, H. (2017). Kepemimpinan Bupati Batang Dalam Transparansi Anggaran Dana Pada Tahun 2012-2017. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 7(2), 66-78.
- Da Meisa, E. A., & Anzari, P. P. (2021). Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 711-719.
- Dzuhayatin, S. R. (2012). Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan. *Jurnal Studi Gender*, 11(1), 135-178.
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.
- Mambu, T. R., Rares, J. J., & Waworundeng, W. (2023). Gaya Kepemimpinan Perempuan Sebagai Pejabat Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. *Journal Publicuho*, 6(4), 150-159.
- Mariastutik, I. S. (2023). Peran Kepemimpinan Perempuan Di Sektor Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*).
- Mewengkang, L., Mandey, J., & Ruru, J. (2016). Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(44), 80-92.
- Rohaeni, H. (2016). Model Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ecodominica*, 4(1), 36-40.
- Syabrina, N. N., Sjafari, A., & Nugroho, K. S. (2018). Kepemimpinan Hj Ratu Tatu Chasanah Sebagai Bupati Kabupaten Serang (Studi Kasus Pelayanan Publik Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak) (*Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*).
- Ulandari, D., Malik, I., & Tahir, N. (2022). Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik di Kabupaten Luwu Utara. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 448-458.
- Viliani, R., & Djohan, H. D. (2020). Kepemimpinan Bupati Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Bupati Neneng Hasanah Yasin 2012-2018). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 32-47.

Lain-lain:

Undang-undang 1945.

Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 tentang Kuota Partisipasi Politik Perempuan DPRD.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 59 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 56 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.